

**Judul** : Guru madrasah jadi PPPK, cermin perbaikan dunia pendidikan  
**Tanggal** : Senin, 03 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Guru Madrasah Jadi PPPK

# Cermin Perbaikan Dunia Pendidikan

ANGGOTA Komisi X DPR Furtasan Ali Yusuf mendukung keinginan para guru madrasah mendapat hak yang sama menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab suara para pendidik adalah cerminan harapan untuk perbaikan dunia pendidikan di Indonesia.

Diketahui, sejumlah guru honorer dari madrasah swasta menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian mereka agar dapat diangkat menjadi PPPK, perlindungan profesi, pengakuan masa kerja, dan tunjangan yang layak.

Selain itu, para guru madrasah mendesak penghapusan regulasi yang diskriminatif terhadap guru madrasah swasta, keadilan dalam pembagian anggaran dan program pendidikan. "Kami sangat prihatin dengan kondisi rekan-rekan guru di lingkungan swasta," kata Furtasan dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Furtasan melanjutkan, keadilan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan, termasuk dalam kebijakan terkait



Dini Rahmania

99  
Saya akan mengidentifikasi secara konkret jumlah guru madrasah swasta yang belum memperoleh status PPPK.

para guru. Perlu ada penegasan dan pemerataan kesempatan bagi para guru madrasah non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat berpartisipasi secara adil dalam rekrutmen PPPK dan ASN.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru madrasah. Caranya, melalui regulasi, anggaran, dan pengawasan.

"Saya akan mengidentifikasi secara konkret jumlah guru madrasah swasta yang belum

memperoleh status PPPK atau pengakuan masa kerja secara memadai," kata Dini dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Untuk itu, Dini mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Agama (Kemendiknas) segera menyusun program insentif dan tunjangan yang adil bagi guru madrasah swasta. Tujuannya, agar mereka mendapatkan perlakuan yang setara dengan guru negeri.

"Revisi regulasi ataupun kebijakan yang memengaruhi guru madrasah, termasuk pengangkatan PPPK, pengakuan masa

kerja, tunjangan profesi, diarahkan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan," tegas politikus Nasdem ini.

Dia akan memfasilitasi forum dialog di tingkat kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi guru madrasah, dengar langsung pengalaman mereka, dan kemudian menyampaikan rekomendasi ke tingkat pusat. Tujuannya, agar kebijakan Pemerintah bisa benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.

Dini menyampaikan penghormatan kepada para guru madrasah atas pengabdian selama ini. Perjuangan dan kesejahteraan para guru madrasah adalah bagian penting dari upaya mencerdaskan anak bangsa dan membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.

"Mari kita terus bersamasama memperkuat kualitas pendidikan madrasah di Indonesia mulai dari kesejahteraan gurunya," ajak dia.

Sementara, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama (Kemendiknas) Thobib Al Asyhar menilai, demo sejumlah guru honorer dari madrasah swasta merupakan bentuk

aspirasi dan perjuangan dari para guru. Pemerintah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya.

"Pemerintah akan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para guru madrasah," ujar Thobib dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Menurut Thobib, aksi ini pernah disampaikan oleh para guru madrasah kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelumnya. Hal ini tentu akan menjadi bahan kajian agar apa yang mereka sampaikan menjadi perhatian semua pihak.

"Kita sangat menghargai dan menghormati terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para guru madrasah," kata dia.

Kemendiknas, kata Thobib, selama ini terbiasa mendengarkan aspirasi para guru madrasah dan akan terus berupaya untuk akselerasi terhadap pendidikan profesi guru atau sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini menjadi fokus yang akan diselesaikan di Kemendiknas untuk guru semua agama pada 2026. "Total yang menjadi target tahun 2026 adalah lebih dari 600 ribu yang akan diselesaikan," pungkasnya. ■ TIF